

**TESIS**

**INKONSISTENSI PENGATURAN MODAL DASAR DALAM  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TUJUAN  
KEPASTIAN HUKUM**



**JOSHUA AGUSTHA**

**No. Mhs. : 165202583/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joshua Agustha

No. Mahasiswa : 165202583/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul:

**“INKONSISTENSI PENGATURAN MODAL DASAR DALAM  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TUJUAN  
KEPASTIAN HUKUM”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 November 2017

Yang menyatakan,



Joshua Agustha

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “INKONSISTENSI PENGATURAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TUJUAN KEPASTIAN HUKUM” pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kesempatan ini disampaikan juga rasa terimakasih kepada Ibu Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum. dan Bapak Dr. ST. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih ini juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum. dan Bapak Dr. ST. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk serta motivasi pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik;
6. Bapak/Ibu dosen dan segenap Civitas Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu selama masa studi penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan;
7. Bapak Dr. I Made Priya Dharsana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn, Hasbi Ash Siddiqy, S.H.,M.Kn, dan Ramzi Baraba, S.H.,M.Kn. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dalam Tesis ini;
8. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, kakak ku dr. Ivan Novianto dan adik ku Hana Novilia serta keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Teman-teman dan sahabatku Callista, Arwan, Lingga, Regi, Akhnes, Kadek, Fater, Anan, Bang Abe, Arsadt, Fariza, Fuja, Gandi, Hairil, Achsan, Wija, Opi, Taza, dan lainnya yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman kelas bisnis MIH UAJY Imel, Duta, Nova, Leny, Ka Ira, Rendy, Bang Jun, Mas Syarief yang telah memberikan motivasi satu sama



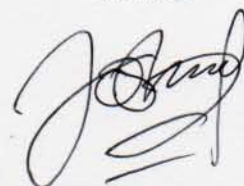
lain untuk lebih baik lagi dan tempat bertukar pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2016 yang Penulis tidak dapat sebutkan satu per satu yang selalu memberikan motivasi satu sama lain kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, semoga kekurangan yang ada bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan serta dapat membawa hikmah bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, November 2017

Penulis



Joshua Agustha

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KEASLIAN PENELITIAN .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Tujuan Hukum .....	12
B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum .....	14
C. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	18
D. Tinjauan Tentang Hukum Yang Berlaku ( <i>Ius Constitutum</i> ) Dan Hukum Yang Harus Ditetapkan ( <i>Ius Constituendum</i> ) .....	20
1. Hukum Yang Berlaku ( <i>Ius Constitutum</i> ) .....	20
2. Hukum Yang Harus Ditetapkan ( <i>Ius Constituendum</i> ) .....	21
3. Proses Perubahan <i>Ius Constitutum</i> Menjadi <i>Ius Constituendum</i> .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	26
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	28

3. Modal Perseroan Terbatas .....	33
F. Landasan Teori dan Konsep.....	39
G. Batasan Masalah Dan Batasan Konsep .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan .....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	50
F. Proses Berpikir.....	54
G. Hambatan Yang Dihadapi.....	55
H. Cara Mengatasi Hambatan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Implikasi Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	56
B. Pembaruan Hukum Terhadap Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pendapat Narasumber terhadap PP No. 7 tahun 2016 yang digantikan oleh PP No. 29 tahun 2016.....	70
Tabel 2. Pembaruan hukum terhadap PP No. 29 Tahun 2016 .....	82



## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) terhadap tujuan kepastian hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan hukum terhadap modal dasar dalam pendirian PT. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara narasumber. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Konsep kepastian hukum, teori pembangunan ekonomi, dan teori sistem hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian PT terhadap tujuan kepastian hukum yaitu pengaturan modal dasar PT setelah dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2016 yang kemudian digantikan oleh PP No.29 tahun 2016 tidak mengedepankan tujuan hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah tidak adanya kejelasan atau ketegasan, dan tidak konsisten dari norma tersebut serta adanya keraguan mengenai penentuan modal dasar PT yang didasarkan pada kesepakatan para pendiri. Kemudian Pembaruan hukum terhadap pengaturan modal dasar dalam pendirian PT yaitu dengan menerapkan kembali substansi dari PP No.7 tahun 2016. Substansi yang diterapkan adalah pemberlakuan modal dasar dalam pendirian PT untuk seluruh kegiatan usaha adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,- tetapi dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT. Tujuannya agar dapat mampu mewujudkan peraturan secara ideal, proporsional dan dapat memberikan tujuan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendirian Perseroan Terbatas, Modal Dasar Perseroan Terbatas, dan Kepastian Hukum.

## ABSTRACT

The topic of the thesis is “inconsistency arrangement the capital base of the in the establishment of limited companies to the purpose of legal certainty”. The thesis with such title aims to review and analyze the implication of arrangement the capital base of the in the establishment of limited companies to the purpose of legal certainty and to know and analyze the renewal of a law in regard to the capital base the in establishment of limited companies. The research is normative research with the approach regulations (statute approach). The data source in the form of secondary data which is made up of primary and secondary law material. The data collection method using the study literature available (library research) and interview the source of information. Law material primary and secondary were analyzed using the method of analysis law. The inductive thought process used to draw any conclusions. The concept of legal certainty, the theory of economic development, and the theory of legal system used as a knife analysis in assessing the research results. Research results on implication of arrangement the capital base of the in the establishment of limited companies to the purpose of legal certainty is the regulation of the capital base of limited companies after the issuance the government regulation number 7 years 2016 to the point where it replaced by the government regulation number 29 years 2016 not only promote intent of the law to be able to provide legal certainty related. Legal certainty is a lack of clarity or firmness from the norm and the doubt about the determination of the capital base of the limited companies based on agreements the founders. Then the renewal of a law in regard to the capital base the in establishment of limited companies is implementing back a substance from government regulation number 7 years 2016. Substance that applied is the enactment of capital base of the in the establishment of the limited companies for all activities an economic undertaking was be at least of fifty million rupiah but in regard to any one of founders or all founders of the company limited having net assets of in accordance with the criteria for UMKM, the capital base of the paid up shall be determined based on the agreement among the founders of the limited companies which it is poured in the deed of establishment limited companies. The aim of this regulation so as to be able to realize in an ideal manner, proportional and can administer the purpose of legal certainty.

Keywords: The establishment of limited companies, The capital base of limited companies, and legal certainty.